

AKTOR POLITIK KONTEMPORER DALAM PERSPEKTIF *PSYCHOCULTURAL*

SyamsulAsri

Dosen Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar

Email: syamsulasri14@gmail.com

Abstrak

Today, the post industrial era of digital modernity presents politics as a popular, non-elitism, day to day discourse. Even everyone may be a politician, who are aware of their surrounding power relation and get constantly involved in formulating political vision and mission, regardless of internal irrational overlapping interests. The contemporary political actors, whether or not they like it, have to disclose themselves to all possible approaches applied by any groups of people including both local businessmen and multinational capitalists, whose latter multilayered interests dominate structural politics. Politics of image culminates the actors' existence, while the media plays amplifying roles and this point runs as a symbiosis; using the Panopticon concept of Foucault, a contemporary political actor as well as a subject and an object of Panopticon. Whether or not he was aware, Foucault had been trapped within a network of communication which either he himself established it or outsider's systemic power did it. This in turn bears undisputable injustices sentiment among the very original owners of the polis; the demos or the people.

Keywords: Contemporary Political Actor, Foucault, Discourse, Media, *Panopticon*, Polis, Demos

Pendahuluan

Berpagutnya antara negara dan pasar dalam bingkai relasi yang paradoksal membuat manusia-politik menemukan dirinya dalam caramengada baru yang belum sepenuhnya bisa dimaknai. Manusia-politik penulis defenisikan sebagai aktor politik yang menghidupi sekaligusdireproduksi oleh struktur politik.Semua struktur sosial (termasuk didalamnya struktur politik) adalah wajah/pengejawantahanrasionalitas kemanusiaan dalam rangka maksimalisasi peluang dan minimalisasiresiko peradaban. Struktur sosial berasal dari dan kemudian meneguhkan wacana bahwa manusia adalah

entitas sosial yang sepenuhnya sadar akan situasinya; mampu meregistrasi hubungan kata dengan makna, mampu mengaitkan yang simbolik kembali kepada yang nyata, serta mampu memelihara gairah agar tidak berubah menjadi rutinitas.

Claud Lefort dalam *Democracy and Political Theory* menyatakan bahwa ada beda antara *le politique* (*The Political*, yang mengacu kepada asal muasal, fondasi, akar dan tujuan *polis* yang hadir-di-sana namun selalu berhasil menghindari dari penamaan dan pemaknaan konstan.¹ *The political* adalah gerilya tanpa henti “apa-apa-yang-tidak-tertata” / yang tidak dikenali / yang tidak disadari oleh rezim bahasa dan wacana, dan kadang muncul dalam momen demokratis hakiki yang lazim kita sebut sebagai revolusi) dan *la politique* (*Politics*, mengacu kepada praktik rutin sehari-hari untuk berebut kuasa dengan beragam cara).

Yang *pertama* mengacu kepada momen ketika politik sebagai gairahan penemuan kekitaan mengemuka dan menginspirasi manusia untuk mengawali lagi bentuk *polis* mereka, sedangkan yang *kedua* mengacu kepada rutinitas dalam produksi-distribusi-konsumsi institusi-institusi publik (komisi, partai politik dan lembaga-lembaga yang lambat laun mengambil alih gairah komunal-organik *the Political* untuk selanjutnya diolah menjadi prosedur tanpa wajah yang predatoris). Tulisan ini dimaksudkan sebagai penjelasan *pathopsychocultural* mengapa politik kontemporer mesti dimaknai sebagai jalan panjang menemukan (atau ditemukan) kembali gairah ketika menatap wajah orang lain sebagai wajahku-di-sana, dan bukan sebagai emblem yang bisa dimanipulasi secara rutin.

Aktor Politik Kontemporer

Kondisi peradaban kekinian melahirkan pemaknaan yang membedakan politik kontemporer. Aktor politik kontemporer² yang mereproduksi diri secara timbal balik dengan struktur modernitas digital pasca industri, telah menawarkan (sekaligus sandera) definisi tentang politik sebagai hampir segala sesuatu; politik kantor, politik media, politik pangan, politik seks, politik kuliner, politik *life style*, politik anggaran, pelacur politik, hasrat/libido politik, mesin politik, *hyperpolitics*, *soft-hard politics*, *low-high politics* dan seterusnya, yang menggambarkan popularisasi/massifikasi pengetahuan tentang

¹Claud Lefort, *Essais Sur le politique* diterjemahkan David Macey, *Democracy and Political Theory*, (Cambridge: Polity Press, 1991), h. 10-1

²Saya memaksudkan aktor politik kontemporer sebagai subjektivitas yang direproduksi oleh kondisi dan ilmu politik kekinian.

identitas politik, posisi/lokasi sosial-politik dan strategi politik, yang mesti dipersepsi secara memadai dalam suatu dunia yang terbangun di atas relasi kekuasaan, berbasis teknologisasi komunikasi antara warga *polis*.³

Politik hadir dimana-mana sebagai *discourse* (diskursus) keseharian yang semakin populer (tidak elitis) berkat jaringan media yang memiliki kemampuan *real-time broad casting*; setiap orang adalah politisi (dalam arti memiliki kesadaran akan relasi kuasa yang melingkupi dan dihidupinya) yang terlibat dalam proses terus-menerus merumuskan visi & misi *polis* yang terbangun di atas tumpang tindih *interest* yang tidak selamanya rasional.

Imagologi adalah kemestian dalam situasi seperti ini. Imagologi adalah istilah kunci dari Milan Kundera yang menggambarkan berkuasanya secara total *image/ tanda/ tampakan/ citra* dalam *polis* yang terdigitalisasi secara konstan. Apa-apa yang tidak mampu dihadirkan dalam kemasan citra yang menyilaukan atau menjijikkan maka secara ontologis hal-hal tersebut tidak ada, walaupun ada ia menempati kasta paria dari piramida eksistensi.

Politik citra dan pencitraan adalah titik api eksistensi aktor politik kontemporer.⁴ Kamera dan internet jauh lebih penting ketimbang visi moralistik, misi konstruktif dan audiens. Penampakan politis adalah hakikat politik itu sendiri, sehingga, misalnya, *spin doctors* lebih efektif ketimbang kader loyal yang terbina bertahun-tahun dalam atmosfer pendidikan politik. Lagi, untuk menjadi politisi struktural yang dibutuhkan sekadar tampang pas-pasan, blog & akun twitter/facebook, serta "uang siar" untuk dibagikan kepada media agar bersedia meliput. Latar belakang, profil pendidikan, pengalaman membasis, kontribusi bagi komunitas, serta proses seleksi struktural dalam suatu ruang-waktu politis yang teruji menjadi sesuatu yang mubazir saat ini.

Politik citra, suka tidak suka, akan berujung pada politik identitas. Aktor politik kontemporer adalah hasil ledakan ke dalam (*implode*) konstruksi

³Yasraf A. Piliang, *Transpolitika* (Bandung: Jalasutra, 2011), h. 420-3. Saya mendefinisikan *polis* sebagai panggung dan ruang politik. Politik sendiri saya maknai sebagai ikhtiar (yang tidak pernah mudah) untuk menemukan dan merawat kekitaan melalui konflik rasionalisasi tentang keadilan, kekuasaan dan kepemimpinan dalam suatu ruang sosial. Hal politis (*the political*) termasuk di dalamnya kondisi politik yang dijumpai dalam suatu *polis* itu selalu manusiawi, alami dan hadir dalam setiap potongan ruang dan waktu. Jangan dikacaukan antara *polis* dan negara; *Polis* merupakan asal usul sekaligus tujuan negara. *polis* itu adalah kesemua manusia, sementara negara baru berumur kurang dari 300 tahun. Negara pernah tidak hadir dan akan kembali hilang jika bentuk-bentuk konflik politik yang dikonsolidasikannya tidak lagi berorientasi kepada kekitaan.

⁴*Ibid*, h. 219-221

identitas sebagai residu intensnya proses saling menatap semua aktor dalam *polis* berkat revolusi teknologi informasi. Politik identitas mengkonsolidasikan kekuasaan bagi hasrat akan keadilan dalam terminologi kesukuan, agama, partai politik, profesi, dan *life style*. Kekuasaan melalui panggung kepemimpinan representasional diarahkan untuk menyukseskan agenda-agenda pragmatif berbasis identitas konstruksional. Ini beresiko; bukan sekadar peluang konflik horizontal yang semakin membesar, melainkan terabaikannya makna politik yang hakiki sebagai usaha bersama untuk menemukan dan merawat kekitaan.

Jika yang pokok dalam suatu *polis* adalah menjadi ditatap atau menatap dalam bungkus citra, maka kapitalisasi aktor politik kontemporer tidak terelakkan. Aktor politik kontemporer mesti sanggup mengomunikasikan dirinya agar jumlah audiens yang menatapnya semakin besar setiap saat, karena itu aktor politik kontemporer, mau tidak mau, mesti membuka dirinya kepada semua bentuk pendekatan dan penghampiran yang dilakukan oleh segmen warga, termasuk para pebisnis lokal dan kapitalis multinasional, segmen warga yang memiliki kepentingan berlapis atas politik struktural. Aktor politik kontemporer, agar mampu menampilkan diri sebagai wakil semua kepentingan (termasuk kepentingan pasar), mesti mengembangkan sensitivitas tinggi agar siklus kapitalisasi di sekitar dirinya tidak mendikte tindakan politiknya.

Aktor politik kontemporer diharuskan mengembangkan strategi media yang sukses demi tujuan popularitas bagi pencapaian target audiensi. Kebutuhan aktor politik kontemporer terhadap media sangat vital dan berlangsung dalam bentuk simbiosis; aktor politik kontemporer membutuhkan media sebagai amplifier dirinya demi komunikasi intensif dengan seluruh *polis* dan media membutuhkan aktor politik kontemporer sebagai komoditi pemberitaan untuk dijual, semakin sensasional dan mengguncang sang aktor politik, semakin berkerumun pula media di sekitarnya. Lebih jauh; profil dan tindakan aktor politik kontemporer bahkan bisa dijadikan komoditi ekspor dalam jaringan media global yang terkoneksi oleh teknologi informasi dan pasar saham. Obama dan Jokowi merupakan dua contoh yang bagus.

Persoalan tatap-menatap yang ada dalam masyarakat pasca industri berbasis teknologi informasi yang terintegrasi secara global membawa peneliti sampai pada konsep *Panopticon* dari Michel Foucault. Konsep ini menyatakan

bahwa tatapan adalah langkah awal yang vital untuk mendisiplinkan. Yang menatap mendisiplinkan yang ditatap.⁵

Panopticon, secara literal, adalah menara pengawas dalam bangunan penjara yang dari sana sipir penjara mampu menatap semua tahanan tanpa kelihatan oleh para tahanan. Foucault menggunakan *Panopticon* sebagai metafora konseptual bagi kondisi *poliskontemporer*; hadirnya pengawas impersonal dimana-mana untuk mendisiplinkan *polis* dalam bentuk penjara (yang mendisiplinkan pelaku kriminalitas sebagai satu-satunya dosa kontemporer). Inilah salah satu contoh dari diskursus; apa yang ada, benar, baik, indah ditentukan oleh relasi kuasa yang menghasilkan seperangkat aturan yang menyatu secara struktural dalam *polis*.

Relasi kuasa inilah yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dipercakapkan/diketahui, aturan percakapan/pengetahuan yang benar, tipologi percakapan/pengetahuan, patologi percakapan/pengetahuan. Penjara adalah diskursus; hasilnya *gibah* (yang menjadi dosa besar dalam ruang publik tradisional bukan lagi sebuah dosa dalam masyarakat yang tersandera wacana penjara, tapi dosa adalah mencuri dompet misalnya), juga rumah sakit (yang mengawasi dan mendisiplinkan orang sakit sebagai beban bagi produktivitas ekonomi kapitalisme lanjut), begitu pula dengan sekolah (yang mengawasi dan mendisiplinkan anak muda sebagai pemilik tenaga kerja di masa depan), apalagi majalah mode (yang mengawasi dan mendisiplinkan pilihan-pilihan cara hidup), yang bertujuan menghadirkan *order*/tatanan, yang di atas tatanan ini sebuah versi tentang apa yang ada, benar, baik, indah diberlakukan sebagai sesuatu yang alami dan penting.⁶

Ini berimplikasi serius; aktor politik kontemporer adalah subjek sekaligus objek *Panopticon*. Dikatakan subjek *Panopticon* sebab aktor politik kontemporer terlibat secara aktif dalam mengkonstruksi tatanan *polis* melalui produksi bahasa diskursif sehingga, melalui perjuangan politik yakni konflik rasionalisasi, sebuah tatanan bisa dibangun, sehingga kebersamaan bisa ditemukan dan dirawat.

⁵*Ibid*, h. 273-274. Bandingkan dengan Michel Foucault, *La Volente de Savoir* terj. R. S. Hidayat *Ingin Tahu Sejarah Seksualitas* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, tanpa tahun), h. 33.

⁶Yasraf A. Piliang, *Multiplisitas dan diferensi* (Bandung: Jalasutra, 2008), h. 284-5. Penstudi politik kontemporer selayaknya mengevaluasi secara kritis konsep *aparatus* sebagai konsep praktis yang menggambarkan bagaimana hegemoni dan hegemoni-tandingan beroperasi dalam ruang sosial melalui penegakan diskursus yang mendisiplinkan.

Namun, aktor politik kontemporer juga adalah objek *Panopticon*; ada subjek lain di luar dirinya yang lebih memiliki akses besar terhadap diskursus sehingga subjek tersebut mampu mendisiplinkan aktor politik kontemporer. Subjek tersebut bisa dalam bentuk partai politik (inilah wajah struktur terdekat yang hadir di sekitar aktor politik individual kontemporer dimana partai politik bukan lagi sekadar kendaraan pasif bagi agenda aktor politik, melainkan *panopticon* primer dalam era demokrasi representasional yang mengawasi dan mendisiplinkan kadernya), jaringan media lokal dan global (inilah mesin diskursif yang paling utama. "Penguasa media adalah penguasa kebenaran" benar adanya), perusahaan multinasional (sebagai aktor pasar lintas negara, perusahaan multinasional memiliki kepentingan vital bagi *polis*. Jawaban atas pertanyaan tentang bentuk relasi terbaik antara negara sebagai salah satu bentuk *polis* dengan kekuatan pasar akan menentukan wajah peradaban, khususnya di belahan dunia selatan), teroris, kartel narkoba internasional, dan seterusnya.

Inilah aktor politik kontemporer; didisiplinkan dan mendisiplinkan, tersandera dalam jaring komunikasi yang dibangunnya sendiri atau dirancang oleh kekuasaan sistemik (agensialmaupundiskursif) di luar dirinya. Pilihan bagi tindakan politik sangat terbatas dan bahaya hegemoni terhadap *polis* tampak sebagai sesuatu yang dekat.⁷

Panopticon merupakan langkah pendahuluan bagi hegemoni; sasaran hegemoni, melalui diskursus, didisiplinkan terlebih dahulu agar alternatif-alternatifa yang ada tidak muncul. Alternatifaepistemologis dicegah melalui diskursus tentang pengetahuan, alternatiffaontologis dicegah melalui diskursus tentang sejarah alam semesta dan kematian tubuh, alternatiffaaksiologis dicegah melalui diskursus tentang penjara dan rumah sakit.

Hegemoni inilah persisnya yang terjadi dalam skala yang tidak pernah hadir sebelumnya dalam sejarah.⁸ *Empire* adalah sebutannya, inilah yang membuat aktor politik kontemporer tersandera habis-habisan dan tidak mampu berbuat lain kecuali menunduk dihadapan agenda tunggal *empire* yakni akumulasi kapital melalui militerisasi dan digitalisasi industri. *Empire* merupakan sebutan dari Antonio Negri dan Michel Hardt, merujuk kepada

⁷John Storey, *Cultural Studies and the Study of Popular Culture; Theories and method*sterj. LayliRahmawati, *Cultural Studies dan Kajian Budaya Pop* (Bandung: Jalasutra, 2008), h. 5.

⁸AntonioNegri& Michel Hardt, *Empire* (New York: Harvard University Press, 2001), h. 8-12.

subjek supranasional yang berhasil mengonsolidasi sumber daya efektif guna menguasai lalu merepatiasicapital⁹(kapital) dunia sesukanya.

Empire, secara historis, bermula dari pembentukan PBB sebagai organisasi supranegara yang bersifat mengikat bagi anggotanya. Peristiwa ini menjadi puncak evolusi panjang meminggirnya identitas lokal personal berganti identitas global yang impersonal.¹⁰ Deretan piagam dan keputusan hukum PBB yang berlaku lintas negara telah menyediakan landasan aksiologis bagi hadirnya masyarakat internasional sebagai panggung bagi subjektivitas imperialistik; *pertama*, subjek ini tidak memiliki psikologi kultural khas dan historis spesifik yang mengakar-dalam pada sebuah teritorilokal tertentu sehingga orientasi ke masa lalu dianggap sebagai kesia-siaan belaka; *kedua*, masa depan sebagai alur pasti sejarah didefinisikan dalam terma keamanan, sehingga perburuan dan perebutan sumber daya dunia melalui teknologi militer dan digitalisasi komunikasi dan transaksi tidak terelakkan.

Empire menjadi *maximpoliskontemporer*; setiap orang, segala benda, semua peristiwa adalah implikasi dari atau resistensi kepada *empire*. *Empire* berburu minyak, uranium, air, manusia dan informasi/pengetahuan yang tercatat (untuk dikelola menjadi hak paten) dan mengakumulasi itu semua pada tempat-tempat tertentu yang berfungsi sebagai ibu kota sementara. Jika ada gangguan, maka akumulasi kapital tadi segera direpatiasi ke tempat lain yang lebih kondusif.

Absensisakralitas merupakan syarat mutlak bagi berlakunya ontologi yang dipaksakan secara fisik dan simbolik oleh *empire*. Konsep-konsep kunci semisal metafisika, kausalitaseksistensial, jiwa, malaikat, cinta, kosmos, setan (*devil/evil*) dll. mengalamipemiskinan makna secara habis-habisan dalam diskursuskontemporer. Hal-hal metafisis (konsepsi ketuhanan merupakan pusatnya) dianggap sebagai residu zaman mitologis yang tidak verivikatif. Ini disengajaoleh *empire*; jika Tuhan masih hadir dalam ruang sosial maka agenda akumulasi kapital dunia pasti terhalang oleh pandangan dunia yang menekankan kesucian segala sesuatu dalam sejarah.

⁹*Ibid*, h. 219.

¹⁰Agak lucu untuk membayangkan bahwa*empire* adalah manifestasi final dialektika Spirit *a la* Hegel yang rasional dan sempurna sebagai *maxim* moral. Namun inilah keadaannya; *empire* adalah implikasi konstruktivistik-historis dari *nation-state* yang diangankan oleh Hegel untuk terwujud sehingga rasionalitas bisa bertahta sebagai hakim di ruang sosial. Lihat *Ibid*, h. 10-13.

Akibat dari ini semua jelas; bukan hanya tegaknyaprediksiWeberian tentang hilangnya yang mempesona dan misterius dari dunia, bahkan lebih jauh; sirnanya dasar otentik bagi nilai ideal yang menuntun kehidupan sehingga alternatif Hobbesian (*homo homini lupus*/manusia adalah serigala/neraka bagi sesamanya) tidak terhindarkan. Jika Wujud Mutlak yang menjadi sumber kebenaran, kebaikan, keindahan diingkari maka manusia akan membuat definisi dan namanya sendiri tentang yang ada, benar, baik dan indah sehingga salah memberi definisi (salah menamai, bukan dalam format Adamikmelainkan dalam format Setanik)maka nama dan definisi tersebut pasti salah, tidak adil, merusak dan menghinakan.

Bekerja dan belanja tiada henti sebagai bentuk kehidupan terbaik merupakan tawaran satu-satunya bagi warga *polis* yang hidup dalam tawanan diskursusempire. Mengambil gaji hanyalah terminal sementara bagi siklusmengutang-belanja-gajian-bayar utang-belanja-mengutang-gajian.Definisi manusia direduksi sebagai *homoieconomus* yang tumpul sebab tidak mampu mentransendensi benda dan peristiwa di sekitarnya. Manusia, bagi *empire*, adalah akumulator kapital melalui sains modern yang predatoris terhadap keanekaragaman hayati dan kultural dunia sehingga caramengada dalam kondisi militeristik diterima adanya. Industri berbasis hak paten (informasi tercatat yang diburu dan diperebutkan di seluruh dunia, peneliti menyebutnya emas bening) sebagai proyek pembajakan alam semesta materil dan sosial serta pembangunan armada militer terintegrasi menjadi titik api situasi *polis* kontemporer. Alasan bagi resistensi terhadap *empire* yang menggloabal ini sangat mendesak.

Resistensi kepada *empire* juga bersifat global, hadir di belahan dunia mana saja. Aktor politik kontemporer, yang sadar akan posisinya dalam relasi kuasa dengan *empire* akan melancarkan resistensi semampunya. *Empire* dipersepsi sebagai sesuatu yang berlawanan secara diametral dengan *polis*; *empire* mengancam kekitaan sebagai nilai asasi yang mendasari eksistensi *polis*. Jika *empire* dibiarkan, maka tatanan zalim tuan-budak yang menindas dan memecah belah akan terus mewarnai wajah peradaban.

Aktor politik kontemporer, lebih jauh, mengalami posisi yang tidak mudah; di satu sisi ia mesti aktif mengevaluasi kondisi dan situasi *polis* sehingga progresivitas yang signifikan bagi hidup bersama terus hadir, namun di sisi yang lain aktor politik kontemporer terjebak sebagai objek *Panopticon*dari

empire yang mengawasi, mendisiplinkan dan menghegemoninya sehingga pilihan bagi tindakan politik resistensial kurang tersedia.

Pertanyaan tentang siapa aktor politik kontemporer kurang lengkap jawabannya jika tidak menyebutkan manifestasi empirisnya; aktor politik kontemporer meliputi; politisi struktural dan politisi nonstruktural. Politisi struktural meliputi manusia yang bertindak dalam bingkai ruang negara dan kenegaraan, sedangkan politisi nonstruktural meliputi siapapun yang peduli dan terikat kepada *polis*; ibu rumah tangga, pekerja, siswa, aktivis LSM, dst. Sebenarnya ada kategori ketiga yang belum diakui secara memadai oleh wacana keilmuan politik secara resmi, yakni individu superkarismatik-komunikatif yang mampu menjembatani antara kedua aktor politik kontemporer lainnya.¹¹

Tindakan Aktor Politik Kontemporer

Aktor politik kontemporer bertindak dalam bingkai konsensus yang dibangun di atas proses rasionalisasi konfliktual sebagai satu-satunya cara menemukan kepentingan terbaik dalam *polis* yang dihuni beragam kepentingan. Konsensus merupakan perekat utama antar warga *polis* agar tatanan kritis-dialogis bisa hadir. Konsensus menjadi kontrak sosial-politik yang menjadi cikal bakal hukum sebagai aturan hidup bersama. Sedari awal pembentukannya, hukum dan hal-hal yang terkait dengan *polis* senantiasa didiskusikan dalam bingkai rasionalitas konfliktual.¹²

Konflik rasionalitas dan rasionalisasi menjadi cara satu-satunya yang ditempuh oleh aktor politik kontemporer dalam rangka menemukan wujud konkrit dari ruh *polis* yang terlalu abstrak yakni kekitaan/kesemuaan. Namun, sangat disayangkan, membangun konsensus tanpa penyelidikan radikal atas pertanyaan tentang situasi keadilan (*state of justice*) sangat lazim menjadi ciri tindakan aktor politik kontemporer. Ini beralasan; keterburu-buruan eksistensial yang menjadi ciri ontologi modernitas digital pasca industrial. *Polistipe* ini kecanduan akan kebaruan dan alergi terhadap apa-apa yang tua/berumur.

¹¹Lihat Syamsul Asri, *Tindakan Politik Insan Kamil* (Tesis Magister UIN Alauddin, Makassar, Belum Diterbitkan), bandingkan dengan Mikkel Bille, *Politics of Worship in The Contemporary Middle East; Sainthood in Fragile States*, (BRILL Academic Pub; Netherlands/Boston, 2013). Kedua karya ini berusaha menampilkan ontologi politik sakral dalam bentuk hadirnya manusia suci sebagai kontestan politik dalam cirinya yang paling esensial, yaitu tindakan yang berorientasi penemuan kembali terus menerus situasi kekitaan.

¹²F. Budi Hardiman, *Memahami Negativitas* (Jakarta: Kompas, 2005), h. 30

Internet dan media dengan *headlines, breakingnews, real time broadcasting* (singkatnya dengan kemampuan media menjadikan hari ini sebagai masa lalu yang dijelang) menjadi satu-satunya medium komunikasi antara aktor politik kontemporer dengan warga *polis* sehingga manajemen agenda politik menjadi tidak fokus. Masalah *polis* yang mendasar tidak dilirik karena menuntut pikiran terdalam yang tidak cocok jadi jualan media (media senantiasa mengekspos berita-berita yang bisa dikonsumsi secara populer). *Polis* menjadi panggung demonstrasi bagi kecakapan aktor politik dalam menyelesaikan persoalan-persoalan populer namun gagal mengenali akar segala persoalan lalu menyelesaikannya; persoalan keadilan.¹³

Keadilan terbengkalai menjadi keadilan imagologis yang tidak memiliki perwujudan hakiki, hanya citra/penampakan keadilan dalam format drama tentang keadilan di media massa. *State of justice* direduksi sebagai proses peradilan di gedung pengadilan dalam tatapan dan konstruksi media. Inilah soalnya; media massa (cetak/elektronik, fisik/digital) menjadi mediasi antara aktor politik kontemporer, warga *polis* secara keseluruhan dan kondidiri *polis* saat ini tersandera oleh media sehingga yang ada adalah tindakan politik yang media-sentris. Sehingga, alih-alih, sebenarnya tidak pernah ada aktor politik melainkan aktor politik dalam media, tidak ada *polis* kecuali *polis* menurut media serta tidak ada warga *polis* kecuali kerumunan massa yang terhubung satu sama lain melalui kepercayaan pada mesin yang kebenarannya tidak pernah mereka akses.

Keadilan imagologis inilah yang menjadi motor penggerak dinamik *polis*. Partisipasi politik yang termediasi oleh media (tidak hadir saling pengenalan utuh antara warga *polis* yang sibuk bekerja dan belanja sehingga mereka memihak ketigakan kebersamaan; inilah posisi dan peran strategis media sebagai urat nadi *polis*) membuat fokus dan prioritas masalah *polis* yakni persoalan keadilan tersumbat oleh hukum permintaan dan penawaran informasi; permintaan informasi oleh warga *polis* dalam bentuk bahasa populer sebagai efek pembiasaan (baca: pendangkalan [banalisasi]) oleh media disertai penawaran informasi oleh media kepada warga *polis* dalam bentuk rubrik (lima yang utama adalah rubrik kesehatan, karir, asmara, keuangan dan gaya hidup kosmopolitan) yang menekankan progresivitas dan kebaruan dalam ruang sosial. Media adalah anak-anak zamannya dalam arti apa-apa yang baru, *up to*

¹³Maria E. Grabe dan Erik P. Bucy, *Image Bite Politics*, (Oxford: Oxford University Press, 2009), h.3-8

date, eventual akan diliput oleh media agar hadir *sense of timing*, perasaan akan berumah dalam waktu sebagai prasyarat mutlak absahnya verifikasi empiris sebagai mode epistemologi sosial yang valid.

Tindakan aktor politik kontemporer terpasung dalam jipratan kamera dan tenggelam dalam tinta pewarta kebaruan; hal ini menghadirkan warga *polis* sebagai subjek yang memiliki akses kepada dinamika struktural yang sedang berlangsung. Namun ini tidak sepenuhnya benar; simulasi adalah sebutan bagi realitas media yang ditawarkan kepada warga *polis*, keadaan seolah-olah yang secara ontologi sosial beradadi pertengahan antara nyata atau ilusi, ibarat permainan *game* Play Station. Ini disebabkan oleh, sekali lagi, karakter mediatif-konstruksional realitas media. Benar bahwa media membentangkan pemberitaan tentang dinamika politik dan berhasil menghadirkan perasaan terlibat bagi warga *polis*, namun perasaan terlibat ini sangat ambigu dan fluktuatif dikarenakan, lagi-lagi, asumsi ontologis media sebagai subjek yang memburu kebaruan secara total menyebabkan jaminan akan kesinambungan naratif sebagai syarat kebenaran sangat langka.¹⁴

Sinisme terhadap Yang Ideal, parodi atas Yang Sempurna sebagai *role model* dalam ruang sosial, pembonsaian makna akan Yang Nyata merupakan karakter dari tindakan politik kontemporer sebagai implikasi dari susutnya sakralitas dalam ruang sosial. *State of morals* (situasi moral alias etika dalam praktik ruang sosial tertentu) seperti ini menghadirkan “uang palsu” tindakan politik, yang hanya sah dan berlaku dikarenakan adanya “uang asli” tindakan politik. Revolusi adalah kerinduan akan yang asli/nyata sekaligus ungkapan kemuakan atas yang palsu (apalagi jika “uang asli” tindakan politik disudutkan sebagai “uang palsu” tindakan politik).

Polis Aktor politik kontemporer

Mall/pusat belanja raksasa, inilah *polis* aktor politik kontemporer. Belanja atau mati adalah aksioma masyarakat kontemporer dan *polis* yang menghidupi dan dihidupi oleh mereka. Belanja sebagai gayasekaligus jati diri keseharian warga *polis* kontemporer tidak terpisahkan dari ciri utama dinamika politik kontemporer; transaksi. Segala sesautudiperjualbelikan dalam *polistipe* ini, termasuk visi & misi politik, harapan politik, ketakutan politik apalagi suara audiensi politik laku dijual setelah sebelumnya dikemas (*packaging* politik),

¹⁴Yasraf A. Piliang, *Transpolitika, Op.Cit*, h. 171.

dinamai (*branding* politik), lalu dipasarkan (*marketing* politik) dalam suatu ruang sosial yang disebut *polis*.

Dalam situasi ini, *polis* dan pasar (panggung/ruang/agen ekonomi yang menjadikan kapital sebagai titik apieksistensinya) adalah satu dan sama. Cita politik (untuk merawat kebersamaan melalui konflik rasionalitas dan rasionalisasi) yang begitu luhur, wajar, manusiawi dan alamiah mengalami degradasi menjadi komoditi, satu komoditi di antara banyak komoditi lainnya yang dijajakan, ditawarkan, dipindahtangankan lalu, mudah-mudahan tidak sering terjadi, diobral dalam kondisi loak untuk seterusnya dibuang ke dalam tempat sampah peradaban. Namun, peradaban seperti ini sangat tidak layak disebut peradaban, sebab kata dan entitas yang ditunjuk oleh kata ini dibangun secara maknawi oleh tata kelola interaksi yang berkeadaban, bukan adab sebagai ritual hampa makna yang hadir untuk menyembunyikan atau melazimkan kekerasan barbaristik (simbolik maupun fisik) yang ada.

Belanja, dalam *poliskontemporer*, menjadi *maxim* politik; pencapaian politik diukur dari daya belanja suatu *polis*. Jika kekuatan belanja sampai pada jumlah USD 2/hari/orang maka *polis* tersebut sehat secara politik, namun jika belanja tidak mencapai angka tersebut maka *polis* akan menggiatkan tindakan politik untuk mengantisipasi hal ini.

Peningkatan kualitas hidup warga *polis* yang kompleks dan jauh dari kesan sederhana direduksi sebagai fenomena penampakan kuantitatif dalam belanja; ini berisiko sebab kualitas hidup dimaknai sebagai konsumsi sumber daya dunia materil, bukannya produksi dan reproduksi sumber daya materil, psikologis dan spiritual. Akibatnya sangat terasa; hutan Kalimantan dan Amazon semakin tipis, air, udara dan tanah tercemar, kutub mencair, pantai terabrasi, bahasa lokal musnah, hubungan gender timpang, rumit & kompleks, lahan kosong tempat resapan air semakin sempit, polusi cahaya yang menyembunyikan indahnya bulan di malam hari dan mengganggu binatang nocturnal semakin merajalela. Dan buah itu semua; ruang semakin mahal sebagai efek ledakan penduduk.

Mahalnya ruang adalah simptom gagalnyapolis; ini menandakan hadirnya distribusi sumber daya yang tidak merata. Semua konflik sosial dalam *polis* berawal dari ketidakadilan distribusional atas sumber daya. Bisa dikatakan dengan aman bahwa dalam era media digital yang terintegrasi, tindakan politik dalam *polis* diarahkan sepenuhnya sebagai respon/reaksi solutif atas keadaan ini bukan aksi dalam pengertian transformasi keadaan secara kualitatif; sambil

tenggelam, *polis* terus menerus mengobati lukanya yang tidak kunjung kering sembari berharap keadaan akan lebih baik.

Pemilik *polis* yang hakiki yakni *demos* (warga *polis*) menjadi semacam hantu dalam proses rangkap tiga ini; mereka hadir tetapi tidak didengarkan dan tidak memiliki akses atas relasi kekuasaan yang melingkupi mereka. *Demos* hanya eksis menjelang pemilu (ini pun termediasi oleh partai politik yang relatif independen dari *core of interest*-nya *demos* yakni vitalisasi terus menerus makna keadilan dalam keseharian) dan suara pemirsa setiap hari dalam pemberitaan media (fakta mediasi tidak terhindarkan di sini).

Lebih jauh; terasingnya *demos* kontemporer dari ruang publik yang seharusnya menjadi miliknya tergambar jelas dalam arsitektur kuburan.¹⁵ *Demos* tipe ini tidak menghargai kematian karenanya tidak mampu hidup seutuhnya. Kuburan adalah situs paling monumental tentang kehidupan dalam arti seluas-luasnya sehingga *demos* (yang menjadikan hidup bersama secara berkeadilan sebagai inti api eksistensi) memiliki kepentingan strategis terhadap kuburan. Pada kuburanlah *demos* bisa mengambil jarak dari dinamika *polis* yang menjepitnya, rehat sejenak, mengambil pelajaran dari leluhur dan bentuk-bentuk peradaban yang telah berlalu, untuk selanjutnya diolah menjadi energi psikologis-spiritual yang dituangkan menjadi kultur (dalam pengertiannya yang paling mendasar sebagai cara mengada dalam ruang-waktu tertentu) dalam *polis*.

Secara spasial, dalam arsitektur *polis* kontemporer, kuburan menempati ruang di pinggiran, dalam keadaan setengah terurus, tidak menarik sebagai panggung kontemplasi eksistensial, terintegrasi dengan *nature*.¹⁶ Kuburan, dalam kuasi-*polis* ini, dimaknai sebagai penanda antagonistik terhadap mall sebagai monumen peradaban berbasis penaklukan militer berbasis industri digital (dalam hal ini, kuburan dijauhi sebab ia mengingatkan akan penyakit, kematian, akhir dari aktivitas produksi-konsumsi *polis* kapitalistik tingkat lanjut yang belum bisa diantisipasi. Kuburan merupakan penanda bahwa kematian belum terkalahkan dalam masyarakat militeristik industrial ini) yang selalu luput dari proses banalisasi dunia keseharian; kuburan diperlakukan

¹⁵Seluruh bagian tentang kuburan dalam penelitian ini disarikan dari pengalaman saya pribadi sebagai peziarah (pengunjung-penikmat) kuburan.

¹⁶Disandingkan dengan *culture* yakni budaya dalam pengertian pencapaian material, *nature* adalah segala sesuatu yang belum atau tidak lagi masuk ke dalam sistem produksi pascaindustrial. *Nature* bisa berupa alam yang belum terolah dan bisa pula berupa residu peradaban. Kuburan termasuk tipe kedua.

tidak layak sebagai tindakan balas dendam kepada kematian yang belum terkalahkan dalam *poliskontemporer*.

Kesimpulan

Kajian dalam tulisan ini membawa peneliti kepada beberapa kesimpulan temporer, yakni; *pertama*, aktor politik kontemporer semestinya sanggup menjaga jarak aman dari proses kapitalisasi tingkat tinggi disekitar dirinya. Bukan menghindar apalagi mengabaikan. Jarak aman yang peneliti maksud adalah jarak *psychocultural* yang muncul melalui refleksi ganda; refleksi bahwa tindakan/praktik sosial dan wacana/diskursus saling mereproduksi diri satu sama lain. Wacana dan praktik satu dan sama. Refleksi ganda ini akan menyediakan jaring pengaman bagi aktor politik kontemporer agar mampu membangun wacana dan wacana-tandingannya secara lebih otonom dan kritis.

Kedua, *polis* sedari awal senantiasa bermakna komunitas politik yang hadir karena kebutuhan organisasi diri untuk memediasi perjumpaan antar warga *polis*. Ada beberapa catatan singkat tapi perlu; Polis adalah ruh negara modern dan bukan sebaliknya, atau, jika Anda mau, negara modern hanyalah satu wajah/pengejawantahan *polis*, sehingga jika negara modern dan *empire* yang direkomendasikannya mengancam perjumpaan organik antar wajah dalam *polis* maka negara mesti dilampaui, bukan sekadar dengan *civil society*, *anarkism* dan *market government* melainkan dengan invalidasi terus menerus atas negara melalui kuburan. Kuburan merupakan satu-satunya jejak “yang-hadir-di-sana”/yang-menolak-disadari”, satu-satunya penanda makna, satu-satunya wajah transendensi/ketidakhadiran, yang secara konstan ditolak/diparodikan/dimanipulasi oleh rasionalitas instrumental negara (negara adalah kata sedangkan kuburan adalah makna, negara adalah simbol sedangkan kuburan adalah kenyataan, negara adalah bahasa sedangkan kuburan adalah ketidakhadiran) sebagai monumen keberhasilan manusia mengorganisasi diri dalam ruang sosial. Invalidasi inilah yang peneliti maksud sebagai tindakan aktor politik kontemporer.

Daftar Pustaka

- Asri, Syamsul, *Tindakan Politik Insan Kamil* (Tesis Magister UIN Alauddin Makassar, 2012, belum Diterbitkan)
- Foucault, Michel. *La Volente de Savoir* terj. R. S. Hidayat *Ingin Tahu Sejarah Seksualitas*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, tanpa tahun
- Hardiman, F. Budi. *Memahami Negativitas*, Jakarta: Kompas, 2005
- John, Storey, *Cultural Studies and the Study of Popular Culture; Theories and method* terj. Layli Rahmawati, *Cultural Studies dan Kajian Budaya Pop*, Bandung: Jalasutra, 2008
- Grabe, Maria E. dan Bucy, Erik P., *Image Bite Politics*, Oxford: Oxford University Press, 2009
- Lefort, Claud. *Esais Sur le politiqued* diterjemahkan David Macey *Democracy and Political Theory*, (Cambridge: Polity Press, 1991)
- Negri, Anthonio & Hardt, Michel. *Empire*, New York: Harvard University Press, 2001
- Piliang, Yasraf A, *Multiplisitas dan Diferensi*, Bandung: Jalasutra, 2008
- . *Transpolitika*, Bandung: Jalasutra, 2011